

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi.
- Elza Syarief, 2020, *Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Atsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim Edisi Pertama*, UII Press, Yogyakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafikasi, Jakarta.
- Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Kedua Belas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke Delapan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Teddy Prima A, Aldira Mara D, dan Shinfani Kartika, 2023, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Pustaka Mandiri, Tangerang.
- Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. PENETAPAN

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 146/Pdt.P/2024/PN.Sby perihal permohonan menyamakan nama.

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 591/Pdt.P/2025/PN.Sby perihal permohonan menyamakan nama.

D. JURNAL

Abdullah Rafi Utomo, “*Analisis Hukum Perdata terhadap Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang*”, UMP PRESS: Proceeding Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 17, Juli 2024, DOI: <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1147>.

Aidil Firmansyah, et.al., “*Putuan Pengadilan sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi*”, WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No.2, Mar-Jun 2024, <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3>.

Akhmad Farroh Hasan, “*Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama*”, JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, Vol. 10 No. 2, Oktober 2022, DOI:10.20961/jolsic.v10i2.64944.

Anggun Lestari Suryamizon, “*Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*”, Menara Ilmu, Vol. X Jilid 1 No. 70, September 2016, DOI: <https://doi.org/10.33559/mi.v10i60-65.98>

Enju Juanda, “*Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4, No. 1, 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.

Lukmanul Hakim, Angga Alfian, dan Ilham Jodi Renovsi, “*Implementasi Penambahan Nama Seseorang pada Dokumen Kependudukan melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN.Tjk)*”, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 8 No. 2, November 2022, DOI: dx.doi.org/10.59999/v8i2.1648.

M.Taufiq, “*Konsep dan Sumber Hukum : Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, Oktober 2021, DOI: <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Jurnal Crepido, Vol. 1 No. 1, Juli 2019, DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Muhammad Rizky Ramadhan dan Tami Rusli, “*Implementasi Putusan Hakim terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/Pn.Tjk)*”, JLEB: Journal of Law Education and

Business, Vol. 2 No. 1, April 2024, DOI: <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1547>.

Ni Nyoman Aprianti, Sukarno, dan Irma Istihara Zain, “*Tinjauan Yuridis Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*”, Unizar Recht Journal, Vol. 3 No. 1, April 2024, DOI: <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.149>.

Octavianus M. Momuat, “*Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*”, Lex Privatum, Vol. II No. 1, Jan-Mar 2014.

Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, dan I Wayan Arthanaya, “*Kajian Yuridis terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung*”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160>.

Robby Bagus Indrawan dan Risti Dwi Ramasari, “*Dampak Hukum Perubahan Nama pada Identitas Anak terhadap Hak-Hak Keperdataan*”, Yudhistira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2022, DOI: [10.53363/yud.v2i1.28](https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28).

E. DISERTASI

Nurul HAK, 2018, *Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*, Disertasi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

F. SKRIPSI

Anggraini Febriyanti, 2023, *Pertimbangan Hukum Hakim atas Permohonan Perubahan Nama Diri (Analisis Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Lht dan Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN.Lht)*, Skripsi, Program Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Justica Marya Habibah Alfalamy, 2024, *Kajian Yuridis Ultra Vires dalam Perbuatan Melawan Hukum Direksi Perseroan Terbatas*, Skripsi, Program Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

Muhammad Fauzan Azis, 2020, *Analisis Hukum Perdata Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang*, Skripsi, Program Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

G. LAIN-LAIN

Clony Christy Gracy et al, 2022, Sumber Hukum Perdata dalam Segi Yuridis, Laporan Penelitian.

“Paspur bagi jemaah calon haji”, <https://depok.imigrasi.go.id/45967-2/#tab-id-1>, diakses pada 17 Februari 2025.

“Yuripudensi”, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/sistem-pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi.html>, diakses pada 9 September 2025.